KLIPPING BERITA MEDIA MASSA

Jumat, 2 November 2018

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia (Halaman, 3)	Jumat, 2 November 2018	HK Prioritaskan 7 Ruas pada 2019	PT Hutama Karya (Persero) segera merealisasikan pembiayaan Rp 10,5 triliun tahun depan dari penyertaan modal negara (PMN) untuk kelanjutan konstruksi pembangunan di dua ruas dan pembangunan lima ruas baru jalan tol Trans Sumatera
2	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)	Jumat, 2 November 2018	Pembangunan Dua Bendungan Dipercepat	Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi mengatakan bahwa secara konstruksi, pembangunan kedua proyek tersebut dinilai masih sesuai dengan target,
3	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)	Jumat, 2 November 2018	Proyek Jalan dan Air Mendominasi	Proyek di sektor jalan dan sumber daya air mendominasi rencana pelelangan dini tahun anggaran 2019 di Kementerian PUPR.
4	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)	Jumat, 2 November 2018	Anggaran Hibah Ditambah	Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran program hibah air minum sebesar Rp 900 miliar pada 2019
5	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)	Jumat, 2 November 2018	Pembangunan Gelanggang di Papua Dikebut	Pemerintah menargetkan pembangunan sarana olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional dan Pekan Paralimpik Nasional di Papua rampung pada 2019.
6	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)	Jumat, 2 November 2018	Berita Foto	Bedah Pintu Bendung Gembiro
7	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)	Jumat, 2 November 2018	Berita Foto	Pembangunan Hunian Sementara
8	Kompas (Halaman, 21)	Jumat, 2 November 2018	Peluang bagi Jateng	Pembangunan bandara baru di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, diyakini tidak hanya akan memberi manfaat ekonomi bagi wilayah DIY
9	Kompas (Halaman, 26)	Jumat, 2 November 2018	Anies Diundang PUPR untuk Koordinasi	Kementerian PUPR terbuka untuk menerapkan mekanisme pengelolaan banjir usulan Gubernur DKI Jakarta.
10	Media Indonesia (Halaman, 10)	Jumat, 2 November 2018	Program Naturalisasi Sungai masih Dipertanyakan	Berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pada November, curah hujan akan mulai meninggi, yakni melebihi 300 milimeter.
11	Media Indonesia (Halaman, 13)	Jumat, 2 November 2018	Jumlah Wisatawan Mancanegara Capai 11,93 Juta	Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto menyampaikan bahwa kunjungan wisatawan mancanegra ke Indonesia pada September 2018 mencapai 1,35 juta orang, turun 10,56% jika dibandungkan dengan bulan sebelumnya.
12	Media Indonesia (Halaman, 19)	Jumat, 2 November 2018	Pembebasan Tanah Jalan Tol Tebinggi Lancar	Pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional jalan tol Tebingtinggi kuala – tanjung sekitar 42 kilometer, awal November ini dipastikan tuntas.

Judul	**HK Prioritaskan 7 Ruas pada 2019**	Tanggal	Jumat, 2 November 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 3)		
Resume	PT Hutama Karya (Persero) segera merealisasikan pembiayaan Rp 10,5 triliun tahun depan dari penyertaan modal negara (PMN) untuk kelanjutan konstruksi pembangunan di dua ruas dan pembangunan lima ruas baru jalan tol Trans Sumatera		

HK Prioritaskan 7 Ruas pada 2019

JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) segera merealisasikan pembiayaan Rp10,5 triliun tahun depan dari penyertaan modal negara (PMN) untuk kelanjutan konstruksi pembangunan di dua ruas dan pembangunan lima ruas baru jalan tol Trans Sumatra.

Dari total pembiayaan tersebut, sebanyak Rp5 triliun akan dialokasikan untuk penyelesaian konstruksi dua ruas yakni Pekanbaru—Dumai (131 km) dan Terbanggi Besar—Pematang Panggang—Kayu Agung (185 km) yang diharapkan rampung tahun depan. Saat ini, progres konstruksi Pekanbaru—Dumai mencapai 17,7% dan Terbanggi Besar—Pematang Panggang—Kayu Agung 83%.

Adapun PMN Rp5,5 triliun akan dialokasikan untuk pembangunan lima ruas tol baru, yakni Kisaran—Indrapura (47 km), Kuala Tanjung—Tebing Tinggi—Parapat (143 km), Padang—Pekanbaru (255 km), Medan—Aceh (470 km), dan Simpang Indralaya—Muara Enim (88 km).

Direktur Utama HK Bintang Perbowo mengatakan dengan tambahan PMN dan pendanaan sindikasi perbankan belum lama ini, perseroan mengantongi dana Rp42,5 triliun untuk mempercepat pembangunan Trans Sumatra tahun depan. Dalam tahap awal, HK segera memastikan jaringan ruas tol dari Bakahueni—Palembang sepanjang 452 km dapat tersambung seluruhnya pada April 2019.

"Awal tahun depan, pada April kami bisa selesaikan Bakaheuni sampai Palembang untuk tersambung," ujarnya saat berkunjung ke redaksi *Bisnis Indonesia*, Kamis (1/11/).

Selain memastikan pembangunan Trans Sumatra tetap berjalan sesuai target pemerintah, Bintang mengatakan pihaknya juga tengah mengkaji penciptaan nilai tambah di sekitar wilayah yang dilalui Trans Sumatra dengan pengembangan kawasan guna mendorong ekonomi setempat.

Berdasarkan studi pada 8 ruas prioritas di provinsi, diketahui bahwa Trans Sumatra berdampak signifikan terhadap perekonomian Sumatra Utara, Riau, Sumatra Selatan, dan Lampung dengan potensi *output* Rp36,421 triliun dan potensi tenaga kerja yang terserap pada tahun 2040 mencapai 2,3 juta orang.

"Kami akan mempelajari di mana *region* yang bisa dimasuki HK, kemudian kami kerjasamakan dengan developer. Karena ini arealnya ada ratusan, tidak mungkin kami bangun sendiri," kata Bintang.

Menurut dia, HK juga akan mempelajari skema pendanaan yang cocok untuk investasi jangka pendek tersebut, misalnya instrumen *medium term notes* atau obligasi. Salah satu yang paling menjanjikan adalah kawasan perumahan.

Dari catatan *Bisnis*, dalam 4 tahun terakhir HK telah membangun tol Trans Sumatra sepanjang 290 km dengan total investasi Rp41,295 triliun. Beberapa ruas yang sudah beroperasi penuh yakni Medan—Binjai, Palembang—Indralaya dan Bakauheni—Terbanggi Besar.

Direktur Keuangan HK Anis Anjayani menambahkan untuk beberapa ruas tol yang belum mendapatkan kepastian pemenuhan pembiayaan, perseroan mengkaji beberapa skema pembiayaan selain PMN, salah satunya *contractor pre-financing* (CPF).

Berdasarkan catatan *Bisnis*, kelima ruas pembangunan baru oleh HK juga belum masuk tahap *financial close*.

Berbeda dengan skema pembiayaan konvensional lewat kredit investasi, CPF mewajibkan kontraktor untuk menyelesaikan proyek terlebih dahulu dengan dana pembangunan yang diusahakan oleh kontraktor. Setelah itu hasilnya dibayar oleh badan usaha jalan tol (BUJT).

"Yang sudah dapat pendanaan, tidak. Namun untuk ruas yang belum dapat pendanaan tapi kami harus selesaikan segera, maka kami akan gunakan CPF. Kami sedang kaji," ujarnya. *(Irene Agustine)*

Judul	**Pembangunan Dua Bendungan Dipercepat**	Tanggal	Jumat, 2 November 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)		
Resume	Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi mengatakan bahwa secara konstruksi, pembangunan kedua proyek tersebut dinilai masih sesuai dengan target,		

Pembangunan Dua Bendungan Dipercepat

JAKARTA — Pemerintah mempercepat pembangunan Bendungan Passeloreng di Sulawesi Selatan dan Kuningan di Jawa Barat dengan total nilai proyek mencapai Rp1,32 triliun untuk tetap bisa diresmikan pada akhir tahun ini.

Irene Agustine
irene.agustine@bisnis.com

Pembangunan Bendungan Mendukung Ketahanan Pangan

Pembangunan bendungan menjadi salah satu fokus pemerintah selama 2015–2019 guna mendukung ketahanan pangan nasional. Selama kurun waktu tersebut, sebanyak 65 bendungan akan dibangun dan ditargetkan beroperasi seluruhnya paling lambat akhir 2023. Dari jumlah tersebut, 16 bendungan di antaranya merupakan proyek lanjutan tahun sebelumnya, sedangkan 45 proyek lainnya benar-benar melalui tahap pelelangan.

Bendungan yang Ditargetkan Diresmikan Tahun Ini

Bendungan	Lokasi	Nilai Proyek (Rp miliar)
Kuningan	Jawa Barat	519
Gondang	Jawa Tengah	617
Logung	Jawa Tengah	604
Rotiklot	NTT	407
Sei Gong	Batam, Kepulauan Riau	252
Sindang Heula	Banten	496
Mila	NTB	404
Passeloreng	Sulawesi Selatan	800

Sumber: Kementerian PUPR, diolah

Bisnis/Ilham Nesabana

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hari Suprayogi mengatakan bahwa secara konstruksi, pembangunan kedua proyek tersebut dinilai masih sesuai dengan target. Namun, katanya, masih ditemui kendala pembebasan lahan di lokasi genangan bendungan untuk kedua proyek tersebut.

"Konstruksinya pasti selesai [tahun ini], tetapi hanya lahan di tempat genangan ini mungkin agak mundur karena kalau bendungan selesai itu kan tidak hanya konstruksi saja, tetapi juga bisa digenangi untuk *impounding* [pengisian awal]," kata Hari, Kamis (1/11).

Kendati demikian, menurutnya, pemerintah akan berupaya untuk mempercepat proses pembebasan lahan di lapangan agar dua bendungan tersebut tetap bisa diresmikan pada tahun ini.

Di sisi lain, Hari memastikan enam bendungan lain yang ditargetkan dapat selesai pada tahun ini bisa tuntas tepat waktu.

Keenam bendungan tersebut adalah Rotiklot di NTT, Mila di NTB, Gondang dan Logung di Jawa Tengah, Sei Gong di Batam, Sindang Heula di Banten. Progres keenam bendungan rerata telah mencapai finalisasi akhir.

"Kami harapkan bisa dua bendungan ini untuk selesai. Enam bendungan lainnya masih sesuai target. Kalau dua ini bisa dipercepat akan ada delapan yang rampung sampai akhir tahun ini," ujarnya.

▸ Progres keenam bendungan rerata telah mencapai tahap akhir.

▸ PUPR diminta untuk membangun 65 bendungan pada periode 2015–2019.

Sebagaimana dikutip dari data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Bendungan Passeloreng di Kabupaten Wajo direncanakan memiliki kapasitas sebesar 138 juta meter kubik dan diharapkan dapat mengairi lahan seluas 7.000 hektare serta menghasilkan listrik sebesar 2,50 MW.

Bendungan Kuningan di Kabupaten Kuningan direncanakan memiliki kapasitas 25,96 juta meter kubik dan dapat mengairi lahan seluas 3.000 hektare, menyediakan pasokan air baku sebesar 0,30 meter kubik per detik, dan menghasilkan listrik sebesar 0,50 MW.

PROYEK RAMPUNG

Adapun, dari target pembangunan 49 bendungan baru sampai 2019, Hari mengatakan pemerintah telah merampungkan dua bendungan, yakni Tanju dan Raknamo di Nusa Tenggara Timur. Apabila delapan bendungan tetap rampung sesuai dengan target, sisa pembangunan bendungan baru yang tengah berlangsung mencapai 39 proyek.

Kementerian PUPR diminta membangun 65 bendungan pada periode 2015—2019, yang terdiri atas 16 pembangunan bendungan lanjutan dan 49 bendungan baru.

"Kalau untuk 16 pembangunan bendungan lanjutan sudah kami selesaikan. Kalau pembangunan 8 bendungan baru ini selesai, sudah ada 10 yang selesai untuk pembangunan bendungan baru dari total 49 yang direncanakan," jelas Hari.

Direktur Operasi II PT Hutama Karya (Persero) Suroto mengatakan bahwa di bidang pengerjaannya, perseroan tengah memfinalisasi konstruksi pembangunan Bendungan Keureuto di Aceh dan Leuwikeris di Jawa Barat.

"Untuk pengerjaan konstruksi yang kami dapatkan, Keureuto dan Leuwikeris kami harapkan rampung pada akhir tahun ini. Untuk Bendungan Bintang Bano dan Waingapu tengah *on progress*," ujarnya.

Suroto mengatakan bahwa Hutama Karya sendiri belum lama ini memenangi paket pengerjaan konstruksi Bendungan Tiga Dihaji paket I senilai Rp1,07 triliun yang dikerjasamakan bersama PT Basuki Rahmanta Putra.

Dalam paket itu, Suroto mengatakan bahwa pihaknya kebagian untuk membangun bagian bendung sehingga perkiraan konstruksi baru dimulai pada 2020.

"Kebetulan kami bagian bendungnya, biasanya paket I itu jalan akses dulu, *spillway*, baru kami masuk. Mungkin kami akan mulai konstruksi pada 2020," ujarnya.

Judul	**Proyek Jalan dan Air Mendominasi**	Tanggal	Jumat, 2 November 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)		
Resume	Proyek di sektor jalan dan sumber daya air mendominasi rencana pelelangan dini tahun anggaran 2019 di Kementerian PUPR.		

Proyek Jalan dan Air Mendominasi

JAKARTA — Proyek di sektor jalan dan sumber daya air mendominasi rencana pelelangan dini tahun anggaran 2019 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan bahwa kementerian akan mulai melelang 3.610 paket senilai Rp31,28 triliun atau 36% dari total nilai paket lelang pada bulan ini.

Dalam APBN 2019 yang disetujui pekan ini, anggaran Kementerian PUPR tahun depan tercatat Rp110,70 triliun dengan sekitar 80% atau Rp88 triliun merupakan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui pelelangan.

"Paling banyak yang akan dilakukan lelang dini adalah proyek di Direktorat Jenderal Bina Marga dan Sumber Daya Air," kata Endra kepada *Bisnis*, Rabu (31/10).

Kendati demikian, Endra tidak memerinci berapa jumlah pengerjaan proyek pemerintah yang akan mulai dilelang dini di kedua direktorat itu.

Berdasarkan catatan *Bisnis*, Ditjen Bina Marga menargetkan lelang dini pada tahun ini mencapai 2.520 paket dengan nilai Rp18,51 triliun.

Dirjen Bina Marga Sugiyartanto mengatakan bahwa dengan adanya lelang dini, uang muka pekerjaan terserap ditambah paket-paket tahun jamak yang sudah terikat akan mendorong realisasi anggaran Ditjen Bina Marga pada Januari 2019 sebesar Rp1,75 triliun atau setara 4,36% dari pagu anggaran 2019 sebesar Rp40,31 triliun.

Di Ditjen SDA, beberapa pengerjaan konstruksi bendungan proyek tahun jamak tengah dibuka pelelangannya. Beberapa bendungan yang dimaksud yakni Rukoh di Aceh, Manikin di Nusa Tenggara Timur, dan Bagong di Jawa Timur.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa terdapat empat langkah untuk mencapai target pelelangan dini tahun depan.

Pertama, mempercepat proses perencanaan dan persiapan agar pelelangan sudah dimulai November 2018 dan berakhir Maret 2019.

"Kami ingin pada semester dua tahun anggaran sudah selesai tidak ada proses tender lagi," kata Basuki melalui siaran pers.

Kedua, tuturnya, keberadaan unit layanan pengadaan (ULP) dan kelompok kerja pengadaan barang dan jasa (Pokja PBJ) menjadi simpul penting untuk mencapai target pelelangan dini 2019.

Dia berpesan agar para anggota ULP/pokja bekerja secara efektif dan efisien dengan mengetahui kebutuhan, tepat mutu, manfaat yang optimal, dan sesuai dengan harga pasar.

Ketiga, para anggota ULP/pokja harus bertindak adil, tidak diskriminatif, dan mengedepankan asas persaingan yang sehat dalam menentukan pemenang lelang.

Untuk mencapai target tersebut, profesionalitas anggota ULP/Pokja PBJ perlu terus ditingkatkan. ULP/pokja juga terus menjaga kredibilitas dengan tidak melakukan pelanggaran aturan pelelangan.

"Pencegahan pelanggaran aturan lelang dapat meningkatkan efisiensi 10%—30%. Jika dari anggaran Rp100 triliun, kita bisa hindari kerugian sebesar Rp10 triliun yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur," ujar Basuki. ***(Irene Agustine)***

Judul	**Anggaran Hibah Ditambah**	Tanggal	Jumat, 2 November 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)		
Resume	Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran program hibah air minum sebesar Rp 900 miliar pada 2019		

Anggaran Hibah Ditambah

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat mengalokasikan anggaran program hibah air minum sebesar Rp900 miliar pada 2019.

Hibah air minum menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan akses air menjadi 100% kepada masyarakat.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga mengatakan bahwa alokasi anggaran ditambah Rp100 miliar sejalan dengan hasil evaluasi yang cukup menggembirakan.

Dia menyebutkan bahwa sebanyak 97 perusahaan daerah air minum (PDAM) yang menerima program ini mencatat tingkat pemasangan sambungan 100%.

Salah satu penerima hibah dengan kinerja terbaik yaitu PDAM Tirtawening Kota Bandung.

Jumlah sambungan rumah yang direalisasikan PDAM Tirtawening mencapai 15.000 sambungan, terbesar di antara seluruh penerima hibah.

Secara keseluruhan, jumlah saluran terbangun telah mencapai 1,22 juta dengan jumlah penduduk terlayani sebanyak 6,12 juta jiwa.

"Memang masih ada yang [tingkat sambungan] di bawah 50%, tetapi secara umum lebih banyak yang berhasil. Untuk itu saya minta ini diperbesar, kami naikkan [anggaran] Rp100 miliar," ujarnya, Kamis (1/11).

Menurut Danis, hingga akhir tahun ini diharapkan 300 pemerintah daerah akan menerima hibah air minum sehingga pada tahun depan akses air minum kepada masyarakat makin meningkat.

Kementerian PUPR pun memberi sejumlah syarat bagi pemda yang ingin mendapatkan hibah air minum.

Persyaratan itu antara lain pemda harus memiliki Peraturan Daerah Penyertaan Modal Pemerintah dan kesiapan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun berjalan.

PDAM sebagai badan usaha milik daerah juga harus memiliki kapasitas produksi tidak terpakai dan daftar masyarakat berpenghasilan rendah calon penerima hibah. Secara khusus, PDAM berkinerja baik akan mendapat prioritas dalam pemberian hibah.

Selain hibah air minum, Ditjen Cipta Karya sebelumnya juga sudah memberi hibah 414 aset sistem penyediaan air minum kepada pemerintah daerah senilai Rp989 miliar. Aset itu dibangun menggunakan dana anggaran periode 2005—2017.

Danis menuturkan bahwa pemenuhan akses air minum merupakan kebutuhan dasar manusia. Prasarana akses air minum harus terus dibangun untuk menunjang kebutuhan dalam jangka panjang.

Saat ini, akses terhadap air baru mencapai 72%. "Air adalah hak asasi. Dalam melihat [permasalahan] air, *concern* bukan hanya masalah *number*, melainkan juga manusia, generasi yang akan datang," tuturnya.

Menurutnya, kebutuhan air akan terus meningkat di wilayah perkotaan sejalan dengan tren urbanisasi.

Dia menjelaskan bahwa 53% penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan. Persentase ini diproyeksi terus meningkat hingga ke level 67% pada 2035. ***(Rivki Maulana)***

Judul	**Pembangunan Gelanggang di Papua Dikebut**	Tanggal	Jumat, 2 November 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)		
Resume	Pemerintah menargetkan pembangunan sarana olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional dan Pekan Paralimpik Nasional di Papua rampung pada 2019.		

Pembangunan Gelanggang di Papua Dikebut

JAKARTA — Pemerintah menargetkan pembangunan sarana olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional dan Pekan Paralimpik Nasional di Papua rampung pada 2019.

Pemerintah daerah akan mengelola aset-aset sarana tersebut setelah pesta olahraga itu selesai.

Sekretaris Kementerian Pemuda & Olahraga Gatot. S Dewabrata mengatakan bahwa penyelenggaraan PON Ke-20 dan Papernas Ke-16 harus disiapkan secara matang, termasuk pembangunan sarana olahraga.

"PON 2020 harus *well prepared*, kita harus segera mulai karena kalau tidak sudah tidak ada waktu lagi," jelasnya, Kamis (1/11).

Dia menambahkan bahwa pembangunan empat sarana olahraga akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua.

Gatot menyebutkan bahwa sarana olahraga lainnya dibangun dan direnovasi oleh pemerintah daerah. Salah satu sarana yang konstruksinya sedang berjalan adalah Stadion Papua Bangkit.

Stadion yang dibangun sejak Juli 2017 itu ditargetkan rampung pada Desember 2018.

PON dan Papernas akan berlangsung di Papua pada 2020 dengan 38 jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan. Pertandingan akan digelar di sejumlah kota, antara lain Jayapura, Merauke, Wamena, Mimika, dan Biak.

Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan bahwa pihaknya akan membangun empat sarana olahraga, yakni istana olahraga (istora), hoki, kriket, dan akuatik.

Pada Rabu (31/10), Kementerian PUPR telah menandatangani kontrak pembangunan istora dengan PT PP (Persero) Tbk. dan PT Virama Karya (Persero) sebagai pemenang. Nilai kontrak pembangunan istora adalah Rp257 miliar. "Untuk empat *venue* anggarannya Rp1 triliun. Sekarang kita tanda tangan kontrak istora, *next* hoki, kriket, dan akuatik," jelasnya kepada *Bisnis*.

Iwan menjelaskan bahwa istora akan dibangun di Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura dan tak terpaut jauh dengan Stadion Papua Bangkit.

Gedung olahraga ini akan dibangun dengan kapasitas 3.800 kursi dan bisa menggelar sejumlah pertandingan, mulai dari badminton, futsal, bola tangan, pencak silat, karate, dan olahraga dalam ruangan lainnya.

Menurutnya, pemerintah daerah akan diberi kewenangan untuk mengelola sarana olahraga yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Fasilitas itu diharapkan bisa menunjang pembinaan atlet dan pengembangan keolahragaan di Papua.

Pembangunan sarana olahraga di Papua juga mencerminkan pemerataan pembangunan sehingga fasilitas olahraga yang memadai tidak hanya tersebar di Jawa. ***(Rivki Maulana)***

Judul	**Berita Foto**	Tanggal	Jumat, 2 November 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)		
Resume	Bedah Pintu Bendung Gembiro		

BEDAH PINTU BENDUNG GEMBIRO

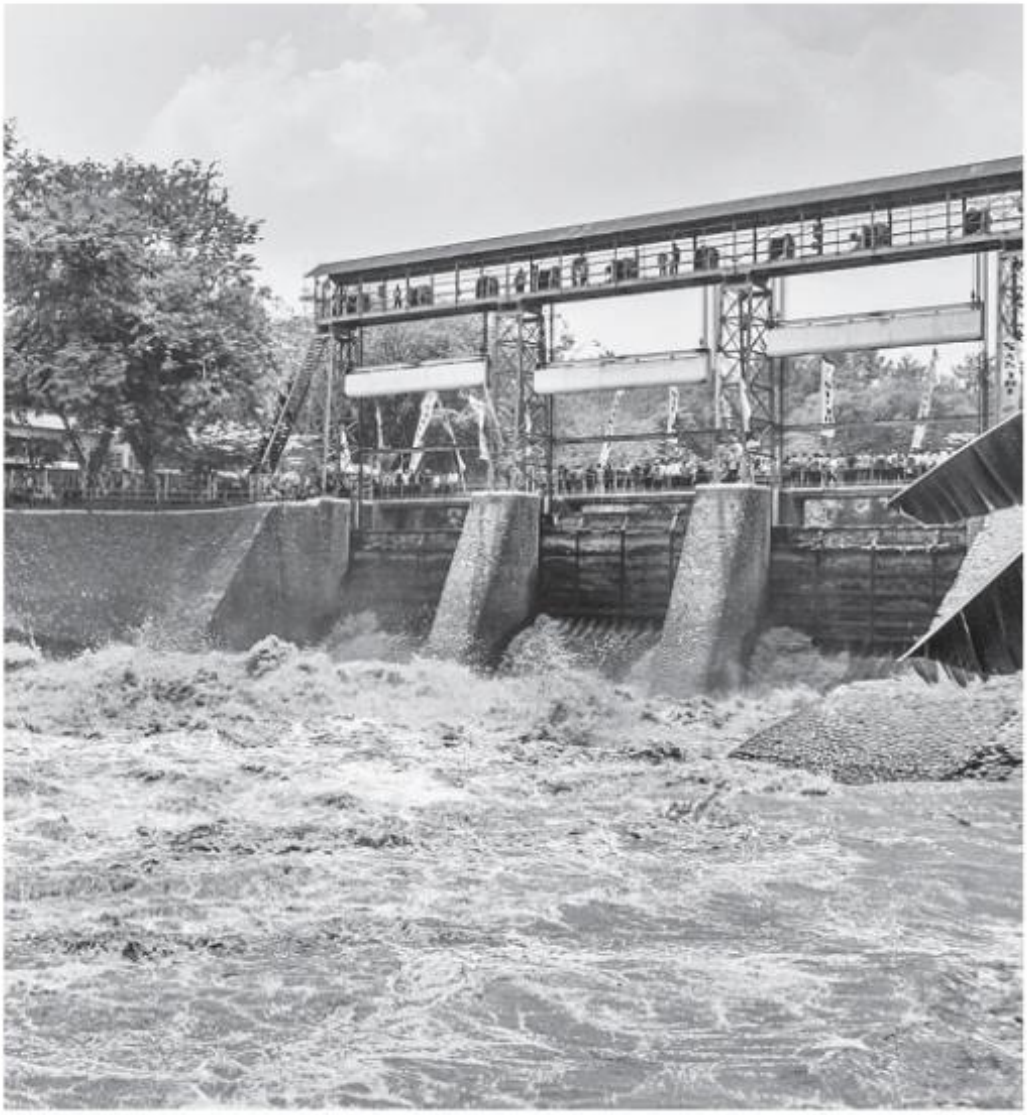

Antara/Harviyan Perdana Putra

Warga mengamati debit air saat Bedah Pintu Bendung Gembiro di Sungai Gembiro, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis (1/11). Pintu Bendung Gembiro peninggalan zaman Belanda pada 1830 yang dibuka setahun sekali tersebut menjadi sarana pengairan sawah warga dan sebagai penunjang program gemar makan ikan.

Judul	**Berita Foto**	Tanggal	Jumat, 2 November 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)		
Resume	Pembangunan Hunian Sementara		

PEMBANGUNAN HUNIAN SEMENTARA

Antara/Basri Marzuki

Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan hunian sementara (Huntara) Kementerian PUPR di Kelurahan Duyu, Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (1/11). Kementerian PUPR membangun 1.200 unit Huntara untuk 14.400 Kepala Keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu, Sigi, dan Donggala dan ditargetkan dapat ditempati pada Desember 2018.

Judul	**Peluang bagi Jateng**	Tanggal	Jumat, 2 November 2018
Media	Kompas (Halaman, 21)		
Resume	Pembangunan bandara baru di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, diyakini tidak hanya akan memberi manfaat ekonomi bagi wilayah DIY		

Peluang bagi Jateng

Pembangunan bandara baru di Kulon Progo, DI Yogyakarta, akan memberi manfaat besar bagi Jawa Tengah. Kabupaten Purworejo sedang bersiap membangun kota perbatasan.

PURWOREJO, KOMPAS — Pembangunan bandara baru di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, diyakini tidak hanya akan memberi manfaat ekonomi bagi wilayah DIY. Kawasan Jawa Tengah bagian selatan, yang lokasinya dekat dengan bandara baru itu, juga akan menerima manfaat.

Demikian terungkap dalam Forum Diskusi "Dampak Pembangunan Bandara Kulon Progo", Kamis (1/11/2018), di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menjadi pembicara kunci dalam diskusi yang diselenggarakan Bank Jateng dan harian *Kompas* itu.

Pembicara dalam diskusi tersebut adalah Bupati Purworejo Agus Bastian, Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno, serta Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jateng Bernardus Arwin. Diskusi dimoderatori Kepala Biro *Kompas* Jateng Gregorius M Finesso dan dihadiri juga oleh Wakil Redaktur Pelaksana *Kompas* Adi Prinantyo.

Ganjar menyatakan, dari sisi geografis, pembangunan bandara Kulon Progo sangat menguntungkan Kabupaten Purworejo. Hal ini karena jarak bandara baru ke Purworejo sangat dekat, sekitar 7 kilometer. "Dari bandara baru ke Yogyakarta jaraknya sekitar 40 km, sementara ke Purworejo cuma 7 km. Bahkan, jarak bandara itu ke Wates (ibu kota Kulon Progo) lebih jauh daripada jarak ke Purworejo," katanya.

Oleh karena itu, Ganjar mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo harus bisa mengambil peluang dari keberadaan bandara Kulon Progo, misalnya dengan mengembangkan usaha perhotelan, perdagangan, dan pariwisata.

"Dengan adanya bandara ini, Purworejo harus berpikir. Sekarang kalau mau buat yang biasa, tidak laku. Purworejo harus membuat yang luar biasa untuk menghadapi bandara," ungkap Ganjar.

Agus Bastian menyatakan, Pemkab Purworejo telah mempersiapkan diri untuk menyambut pembangunan bandara Kulon Progo yang ditargetkan beroperasi secara terbatas pada April 2019. Agus menyebutkan, seiring dengan pembangunan bandara Kulon Progo, Kabupaten Purworejo menyiapkan diri sebagai *border city* atau kota perbatasan antara DIY dan Jateng. "Kami telah mempersiapkan berbagai upaya, misalnya memperbaiki akses jalan dan infrastruktur," katanya.

Supriyatno menyampaikan, setelah adanya bandara Kulon Progo yang berkapasitas 14 juta penumpang per tahun, Kabupaten Purworejo bisa dikembangkan menjadi pintu gerbang bagi kawasan Jateng bagian selatan. Untuk mendukung hal itu, Bank Jateng siap mengucurkan kredit untuk membantu para pelaku usaha di Purworejo, terutama usaha kecil dan menengah.

"Dampak bandara Kulon Progo bagi Jawa Tengah, khususnya Purworejo, itu bukan biasa-biasa, tetapi luar biasa. Yang jadi masalah adalah sekarang dalam waktu singkat kita harus *nyengkuyung* (mendukung) bersama-sama," katanya.

Bernardus Arwin berpendapat, agar bisa memaksimalkan manfaat ekonomi dari bandara Kulon Progo, Pemkab Purworejo harus mengembangkan sektor unggulan yang tidak dimiliki oleh kabupaten/kota di DIY.

(HRS/EGI)

Bank Jateng

KOMPAS
AMANAT HATI NURANI RAKYAT

Judul	**Anies Diundang PUPR untuk Koordinasi**	Tanggal	Jumat, 2 November 2018
Media	Kompas (Halaman, 26)		
Resume	Kementerian PUPR terbuka untuk menerapkan mekanisme pengelolaan banjir usulan Gubernur DKI Jakarta.		

Anies Diundang PUPR untuk Koordinasi

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terbuka untuk menerapkan mekanisme pengelolaan banjir usulan Gubernur DKI Jakarta. Sebab, menangani banjir perkotaan perlu kerja sama semua pihak.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hari Suprayogi, Kamis (1/11/2018), di Jakarta, mengatakan, rencana induk pengendalian banjir sudah lama dibuat pemerintah. Wujud dari rencana itu adalah rencana normalisasi Sungai Ciliwung, membangun sudetan Sungai Ciliwung ke Kanal Timur, serta pembangunan bendungan kering (*dry dam*) yang saat ini sedang dalam tahap konstruksi, yakni Bendungan Ciawi dan Sukamahi.

Terkait dengan konsep naturalisasi yang dikemukakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Suprayogi tidak mempermasalahkan. "Kita akan dukung yang penting dampak banjir untuk masyarakat Jakarta bisa berkurang," katanya.

Mengenai konsep naturalisasi sungai yang dikemukakan Anies, kata Suprayogi, pihaknya telah dua kali mengirimkan surat kepada Gubernur DKI. Kementerian PUPR bermaksud mendiskusikan konsep tersebut dalam kerangka pengendalian banjir Jakarta. Namun, dari dua kali undangan tersebut, Gubernur DKI tidak datang dan hanya diwakili stafnya. Kementerian PUPR akan mengundang kembali Anies untuk melakukan koordinasi.

Proyek-proyek infrastruktur yang menjadi bagian dari sistem pengendalian banjir Jakarta, seperti sudetan Sungai Ciliwung dan Normalisasi Sungai Ciliwung, saat ini masih menunggu pembebasan lahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena pembebasan lahan belum jelas, Kementerian PUPR pun tidak menganggarkan konstruksi proyek sudetan Sungai Ciliwung dan normalisasi Sungai Ciliwung.

Saat ini konstruksi proyek sudetan Kali Ciliwung sekitar 50 persen. Dari rencana 33 kilometer untuk proyek normalisasi Ciliwung, yang terlaksana baru 17 km. Sementara bendungan kering Ciawi dan Sukamahi direncanakan akan selesai pada 2020. "Dulu direncanakan dibangun Waduk Depok, tapi keduluan menjadi kawasan permukiman. Untuk pengendalian banjir, yang penting semua pihak berkomitmen. Kalau hanya satu pihak, jadinya tidak maksimal," ujar Suprayogi.

Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR Jarot Widyoko menambahkan, selain proyek fisik oleh pemerintah, diperlukan kesadaran masyarakat untuk memaksimalkan agar air hujan masuk ke tanah, tidak langsung dialirkan ke sungai. (NAD)

Judul	**Program Naturalisasi Sungai masih Dipertanyakan**	Tanggal	Jumat, 2 November 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, 10)		
Resume	Berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pada November, curah hujan akan mulai meninggi, yakni melebihi 300 milimeter.		

Program Naturalisasi Sungai masih Dipertanyakan

BERDASARKAN prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pada November, curah hujan akan mulai meninggi, yakni melebihi 300 milimeter. Jakarta menjadi salah satu daerah yang akan didera curah hujan tinggi itu.

Dengan tibanya musim hujan, ancaman banjir pun kembali menghampiri. Untuk mengatasi banjir itu, Gubernur Anies Baswedan mengatakan DKI Jakarta memiliki program yang disebut naturalisasi sungai, berbeda dengan program pemerintahan sebelumnya yang dinamai normalisasi.

Namun, program naturalisasi sungai tersebut hingga kini masih dipertanyakan. Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Hari Suprayogi mengaku belum paham dengan konsep yang dikedepankan Gubernur Anies tersebut. Ia sudah mengundang mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu dua kali untuk membahas naturalisasi.

"Tetapi dia tidak hadir. Harapannya, kalau memang gubernur tidak hadir, bisa diwakili, tetapi jangan staf yang bagian jaga pintu juga," ujar Hari, kemarin.

Pada salah satu dari dua pertemuan, lanjutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya mengirim satu orang staf yang menangani sistem aliran barat. "Padahal, waktu itu yang kita bahas adalah aliran tengah. Sebetulnya tidak apa diwakili, tetapi ya harus sesuai dan paham tupoksi," jelasnya.

Ia mengatakan Anies tidak memberikan alasan atas ketidakhadirannya dalam dua pertemuan yang dijadwalkan. "Tetapi kami akan undang lagi segera karena ini sudah mepet musim hujan," ujar Hari

Diharapkan, dengan kehadiran dari perwakilan Pemprov DKI Jakarta, maksud dari istilah naturalisasi dapat dijabarkan secara gamblang sehingga bisa dikoordinasikan dengan program yang dijalankan pemerintah pusat.

"Apa pun namanya, bagaimanapun caranya, kalau tujuannya untuk perbaikan, kami pasti dukung. Tetapi itu harus dijelaskan dulu bagaimana detailnya karena yang saya tahu, naturalisasi itu proses pindah kewarganegaraan," tandasnya. (Pra/J-2)

Judul	**Jumlah Wisatawan Mancanegara Capai 11,93 Juta**	Tanggal	Jumat, 2 November 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, 13)		
Resume	Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto menyampaikan bahwa kunjungan wisatawan mancanegra ke Indonesia pada September 2018 mencapai 1,35 juta orang, turun 10,56% jika dibandungkan dengan bulan sebelumnya.		

Jumlah Wisatawan Mancanegara Capai 11,93 Juta

KEPALA Badan Pusat Statistik Suharyanto menyampaikan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada September 2018 mencapai 1,35 juta orang, turun 10,56% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

"Kalau dilihat dari tahun ke tahun, penurunan ini adalah hal yang biasa karena musim liburan sudah selesai, kemudian di negara-negara Eropa sudah masuk musim gugur. Ini memang biasa terjadi," kata Suharyanto di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan kebangsaan, wisman asal Tiongkok masih menjadi yang paling banyak mengunjungi Indonesia, disusul Malaysia, Timor Leste, dan Australia.

Tahuni ini pemerintah menargetkan dapat mendatangkan wisman sebanyak 17 juta. Adapun realisasi hingga September tercatat 11,93 juta. Tahun depan targetnya naik menjadi 20 juta wisman.

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) mendukung upaya pemerintah meraih 20 juta wisman itu.

Ketua Umum GIPI Didien Junaedy mengatakan pihaknya berupaya meningkatkan koordinasi di antara para pelaku industri pariwisata dalam upaya mencapai target jumlah kunjungan wisatawan tersebut.

Ketua Pokja Bidang Percepatan Pembangunan 10 Daerah Pariwisata Prioritas Hiramsyah S Thaib mengatakan pariwisata Indonesia memiliki banyak keunggulan kompetitif dan komparatif.

Pariwisata Indonesia diproyeksikan mendatangkan devisa sebesar US$20 miliar.

Dampak positif pariwisata terlihat dari terjadinya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat tinggi. Misalnya, PAD di Kabupaten Samosir sebesar 81,2%, Kabupaten Belitung sebesar 41,21%, Kabupaten Pandeglang, Banten (Tanjung Lesung) 94,77%, dan Kabupaten Manggarai Barat (Labuan Bajo) sebesar 35,41%.

"Tiga destinasi telah memiliki badan otoritas, yaitu Danau Toba, Borobodur, dan Labuan Bajo," ujar Hiramsyah. (Nur/Ant/E-1)

Judul	**Pembebasan Tanah Jalan Tol Tebinggi Lancar**	Tanggal	Jumat, 2 November 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, 19)		
Resume	Pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional jalan tol Tebingtinggi kuala – tanjung sekitar 42 kilometer, awal November ini dipastikan tuntas.		

Pembebasan Tanah Jalan Tol Tebingtinggi Lancar

PENGADAAN tanah untuk proyek strategis nasional jalan tol Tebingtinggi-Kuala-tanjung sekitar 42 kilometer, awal November ini dipastikan tuntas. Dengan demikian pembangunan jalan tol tersebut diharapkan bisa berjalan lancar.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatra Utara, Bambang Priono, mengungkapkan, saat ini tim data yuridis dan hukum sudah turun ke lapangan guna mempercepat pengadaan lahan. "Mudah-mudahan awal November ini tuntas. Saya minta dan saya mau KJPP sudah berjalan sehingga akhir Desember 2018 harapannya semua sudah diganti rugi, khusus Tebingtinggi-Kualatanjung. Dengan begitu, awal Desember pekerjaan sudah bisa jalan," ujar Bambang di Medan, kemarin. Perihal konstruksinya, diperkirakan butuh waktu setahun pengerjaannya. "Mudah-mudahan akhir 2019 itu sudah selesai dan bisa dirasakan pembangunannya oleh masyarakat," imbuh Bambang.

Masih terkait, pengadaan tanah Tebingtinggi-Pematangsiantar, lanjut Bambang, saat ini sedang dilakukan inventarisasi dan identifikasi, baik data fisik maupun yuridis. Diharapkan, pada November ini Satgas Yuridis dan Fisik dapat bekerja optimal. Apabila pengerjaan bisa selesai dalam setahun, jalan tol Medan-Tebingtinggi, Tebingtebing-Kualatanjung dan Medan-Tebingtinggi- Pematangsiantar akan terkoneksi semua.

Terkait ruas tol Sei Bamban-Tebingtinggi, kata Bambang lagi, pengadaan tanahnya pun sudah tuntas. Dia optimistis, pada Desember ini tol sudah bisa dipergunakan. Sehingga, pengendara dari Medan maupun Tebingtinggi sudah bisa melalui jalan tol. Dan tidak akan lama jarak tempuhnya apabila masyarakat mau menuju dan dari Jalan Megawati ataupun ke Kualanamu.

"Sumut jangan sampai kalah dengan provinsi lain dalam hal pembangunan jalan tol. Apalagi penyebabnya hanya pembebasan lahan tidak selesai. Bambang mengingatkan bila Sumut gagal mengamankan proyek strategis nasional, pemerintah pusat takkan mau memberikan bantuan dana lagi untuk infrastruktur. Karena itulah pengadaan tanah harus didukung semua *stakeholder*, termasuk elemen masyarakat Sumut.

Direktur Teknik PT Jasa Marga Kualanamu Tol, Agus Choliq sebelumnya menargetkan pada awal Desember 2018 pembangunan pada ruas Seibamban-Tebingtinggi rampung dilakukan. "Karena harapan kita pada saat Natal dan Tahun Baru bisa difungsikan," ujarnya.

Pada umumnya, sambung dia, lahan yang belum bebas disebabkan masalah tanah ahli waris. Hal ini menyebabkan pembayaran kepada pihak ahli waris menjadi lambat dilakukan.

Untuk diketahui, proyek jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT), Seksi 1 Simpang Susun (SS) Tanjung Morawa-Parbarakan telah berfungsi untuk arus mudik dan balik Lebaran 2018. Setelah libur Lebaran 2018, pembangunannya kembali diteruskan. SS Tanjung Morawa-Parbarakan sendiri memiliki panjang 10,75 km yang menghubungkan Jalan Tol Eksisting Belawan-Medan- Tanjung Morawa (Belmera) dengan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi. Seksi 2-6 (Kualanamu-Sei Rampah) yang sebelumnya telah beroperasi sejak 13 Oktober 2017. (PS/N-1)